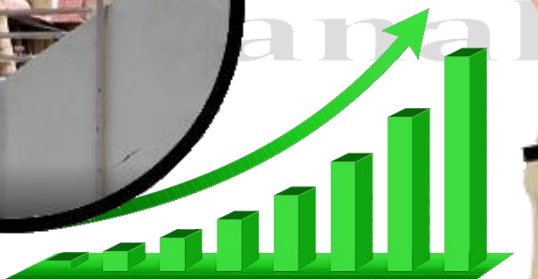
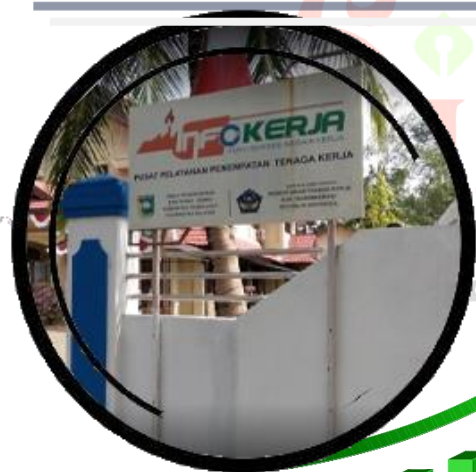




LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2019 (LAKIP)



KINERJAZ



Disnakerind
Tanah Laut
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja untuk Tahun 2019.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut di masa - masa mendatang..... Aamiin.

Pelaihari, 30 Januari 2020

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,


MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tentang capaian kinerja, sasaran selama tahun 2019 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2019.

Pada Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut menetapkan 16 (enam belas) program dan 53 (lima puluh tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 8.228.505.295,-** dan realisasi sebesar **Rp. 6.075.871.689,-** atau sebesar 73,65 %. Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2019 sudah cukup baik.

Demikian dengan disusunnya LAPKIN ini dapat memberikan informasi dan manfaat serta evaluasi dalam pengambilan keputusan guna lebih mendorong peningkatan kinerja maupun kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Tanah Laut dimasa yang akan datang.

Pelaihari, 30 Januari 2020

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut


MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI.....	2
C. PRODUK DAN LAYANAN.. ..	9
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	12
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. VISI RPJMD.....	14
B. MISI RPJMD.....	16
C. TUJUAN SESUAI RENSTRA.....	18
D. SASARAN STRATEGIS.....	19
E. TABEL (TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR TARGET 5 TAHUN).....	19
F. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	20
G. PROGRAM KEGIATAN.....	21
H. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019.....	24
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	33
1. TARGET DAN CAPAIAN IKU.....	33
2. URAIAN DAN ANALISA CAPAIAN IKU.....	33
 B. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS.....	34
1. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS SESUAI RENSTRA DAN TARGET (ESELON II, III DAN IV).....	34
2. URAIAN DAN ANALISA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS.....	42
 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	55
1. RINGKASAN REALISASI APBD TAHUN 2019	

	- BELANJA TIDAK LANGSUNG.....	55
	- BELANJA LANGSUNG.....	55
BAB IV	PENUTUP.....	62
	A. SIMPULAN	62
	B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA.....	62
LAMPIRAN :	64
	1. IKU	
	2. PERNYATAAN HASIL REVIEW TAHUN 2018	
	3. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	
	4. POHON KINERJA	
	5. CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN (I-IV)	
	6. CAPAIAN KINERJA RENSTRA (2013-2018)	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah juga Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan yang baik untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan Tap. MPR RI No. 11 MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas tertib penyelenggaraan Negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas dan Asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai Pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut disusun untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi dan sebuah tekad seluruh Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut untuk mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

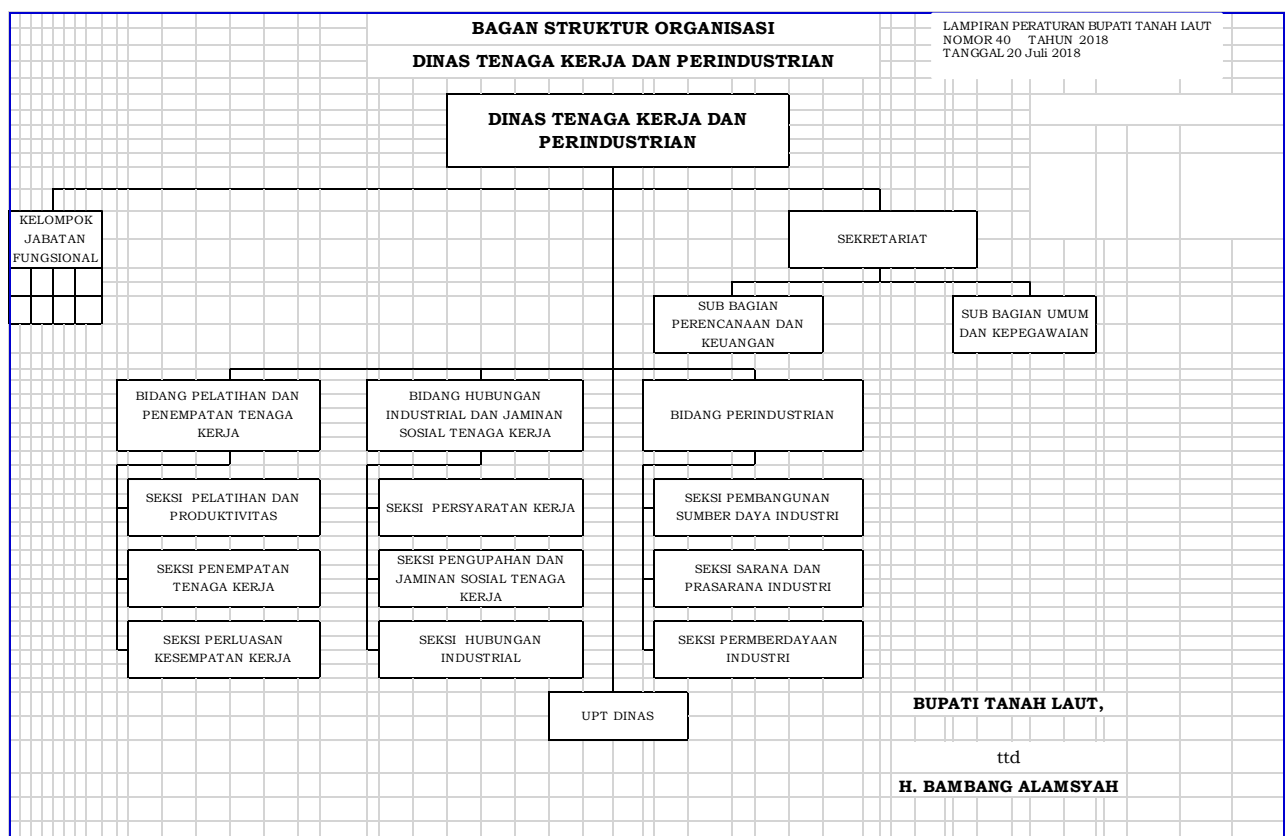
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian serta bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah.

A. Gambaran Umum SKPD.

a) Struktur Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terdiri dari :
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan

- 3) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari:
 - 1) Seksi Persyaratan Kerja;
 - 2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - 3) Seksi Hubungan Industrial.
- e. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Industri; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Industri.
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Tugas Pokok Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Tanah Laut mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- f. pelaksanaan administrasi dinas;
- g. pembinaan UPT Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya..

Dinas Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri :

A. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

B. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:

- 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
- 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
- 3) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.

C. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari:

- 1) Seksi Persyaratan Kerja;
- 2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
- 3) Seksi Hubungan Industrial.

D. Bidang Perindustrian, terdiri dari:

- 1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Industri; dan
- 3) Seksi Pemberdayaan Industri.

E. UPT Dinas; dan

F. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya, tugas pokok pada Disnakerind Kabupaten Tanah Laut diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan manajemen dan pengendalian di bidang Tenaga Kerja, dan Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, menyelenggarakan mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sesuai dengan kewenangannya ;
- b. Memimpin, mengarahkan, merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, dan perindustrian ;
- c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, dan perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Melaksanakan pembinaan teknis pendidikan pelatihan kerja
- e. Melaksanakan pembinaan teknis pengendalian dan pengawasan hubungan industrial dan syarat kerja

- f. Melaksanakan kemitraan dalam peningkatan kualitas keahlian tenaga kerja
- g. Melaksanakan pembinaan teknis tenaga kerja asing
- h. Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis daerah
- i. Membuat laporan kinerja bidang perhubungan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya kepada sekretaris daerah
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Disnakerind Kabupaten Tanah Laut mempunyai Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan perencanaan program Bidang tenaga kerja, dan perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. penyusunan prosedur tetap dan mekanisme kerja Bidang tenaga kerja, dan perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian secara teknis Bidang tenaga kerja, dan perindustrian yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- d. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- e. pengkoordinasian perencanaan program Bidang Ketenagakerjaan, dan Perindustrian dengan instansi vertikal di daerah;
- f. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait guna pengawasan dan pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan program Bidang Ketenagakerjaan, dan Perindustrian;
- g. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan dunia usaha guna pengawasan dan pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan program Bidang Ketenagakerjaan, dan Perindustrian;
- h. penyelenggaraan Kesekretariatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - b. koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
 - d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. koordinasi dan penyusunan Produk Hukum Daerah dibidang tenaga kerja dan perindustrian;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/ jasa;
 - g. koordinasi pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Bidang PPTK

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- f. pelaksanaan administrasi bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang HIJSTK

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjamempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjamenyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Bidang Perindustrian

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang perindustrian;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

C. PRODUK DAN LAYANAN

Produk dan layanan yang dihasilkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut dalam bidang Ketenagakerjaan, dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

A. Bidang PPTK

1. Jenis Pelayanan

Pelayanan publik yang diberikan oleh Bidang PPTK berupa :

- a. Pembuatan Kartu Pencari Kerja/ AK 1
 - b. Rekomendasi Penempatan TKI ke Luar Negeri
 - c. Pemberian Ijin Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK)
2. Prosedur Pelayanan
- a. Pembuatan Kartu Pencari Kerja/ AK 1
 - 1) Pencari Kerja menyerahkan persyaratan, diantaranya :
 - Fotocopy Ijazah dan Transkrip nilai dari SD s/d Pendidikan terakhir.
 - Fotocopy KTP/ keterangan domisili
 - Fotocopy sertifikat keterampilan (jika ada)
 - Fotocopy surat pengalaman kerja (jika ada)
 - Pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
 - 2) Pencari kerja mengisi data (identitas) di buku agenda/ database pencari kerja sesuai dengan tingkat pendidikan.
 - 3) Petugas memverifikasi berkas pencari kerja.
 - 4) Petugas mewawancarai dan menginput/ mengentry data pencari kerja ke website resmi Kemenakertrans RI yaitu :
<http://www.infokerja.depnakertrans.go.id>
 - 5) Petugas mengambil photo pencari kerja
 - 6) Petugas mencetak kartu pencari kerja
 - 7) Petugas antar kerja menandatangani kartu pencari kerja/ AK 1
 - 8) Petugas melegalisirkartu pencari kerja yang sudah digandakan (fotocopy) oleh pencari kerja dan menyerahkan kembali kepada pencari kerja.
 - b. Rekomendasi Penempatan TKI ke luar negeri (SISKOTKLN)
 - 1) PPTKIS dan calon TKI (CTKI) menyerahkan dokumen kelengkapan yang meliputi :
 - CTKI harus dihadirkan
 - KTP, Ijazah, Akte kelahiran/ Surat kenal lahir, Kartu keluarga (KK)
 - Surat ijin suami/ isteri, orang tua atau wali diketahui oleh RT/ Lurah/ Kades
 - Perjanjian penempatan TKI
 - Perjanjian Kerja (PK)
 - 2) Persetujuan dari Kepala Dinas
 - 3) Uji Kelayakan Keputusan CTKI yang meliputi :
 - a. Uji baca tulis bagi yang tidak tamat SD
 - b. Skill/ keterampilan yang dimiliki

- 4) Menginput data CTKI Online melalui website resmi BNP2TKI yaitu SPPTKLN atau SISKOTKLN dengan mengakses :
<http://www.bnp2tki.go.id> atau <http://siskotkln.bnp2tki.go.id>
- 5) Penandatanganan rekomendasi paspor CTKI dan berita acara CTKI oleh Kepala Dinas
- 6) Penyerahan berkas.

B. Bidang HIJSTK

Pelayanan publik yang diberikan oleh Bidang HIJSTK berupa :

- a. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- b. Pengesahan Peraturan Perusahaan
- c. Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama
- d. Pencatatan Pelaporan Pekerjaan Pemborongan dan Jenis Pekerjaan Penunjang
- e. Pencatatan Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh
- f. Pencatatan LKS Bipartit
- g. Pencatatan PHK
- h. Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial

C. Bidang Perindustrian

Pelayanan publik yang diberikan oleh Bidang Perindustrian berupa :

- a. Rekomendasi Ijin Tanda Daftar Industri (TDI)
- b. Pembinaan dan Pemberdayaan Industri

D. UPT BLK

Pelayanan publik yang diberikan oleh UPT. BLK berupa :

- a. Menerima pendaftaran dan melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi di UPT. BLK.
- b. Menerima pendaftaran dan melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi di desa-desa dan kecamatan.
- c. Menerima pendaftaran dan melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi di Balai-Balai Besar Kementerian Tenaga Kerja.
- d. Menerima permintaan dan melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi di perusahaan kerja/ kerja sama dengan pihak ketiga.
- e. Pemanggil peserta yang sudah mendaftar melalui via telp. dan sms.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

1. KATA PENGANTAR
2. IKHTISAR EKSEKUTIF
3. DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
- C. Produk dan Layanan
- D. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan
- D. Sasaran Strategis
- E. Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator, Target 5 Tahun)
- F. Indikator Kinerja Utama
- G. Program dan Kegiatan
- H. Perjanjian Kinerja 2018

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Indikator Kinerja Utama
 1. Target dan Capaian IKU (Tabel)
 2. Uraian dan Analisa Capaian IKU
- B. Capaian Sasaran Strategis
 1. Sasaran Strategis Sesuai Renstra dan Target
 2. Uraian dan Analisa Capaian Sasaran Strategis
- C. Akuntabilitas Keuangan
 1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2019
 - Belanja Tidak Langsung
 - Belanja Langsung

Bab IV Penutup

- A. Simpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu Tahun 2018
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2019
4. Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Triwulan I s.d IV
6. Capaian Kinerja Rentra (2013-2018)



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2018–2023 adalah:

Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus kembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

TERTATA : Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi dan tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

RELIGIUS : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

AKTUAL : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus

dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

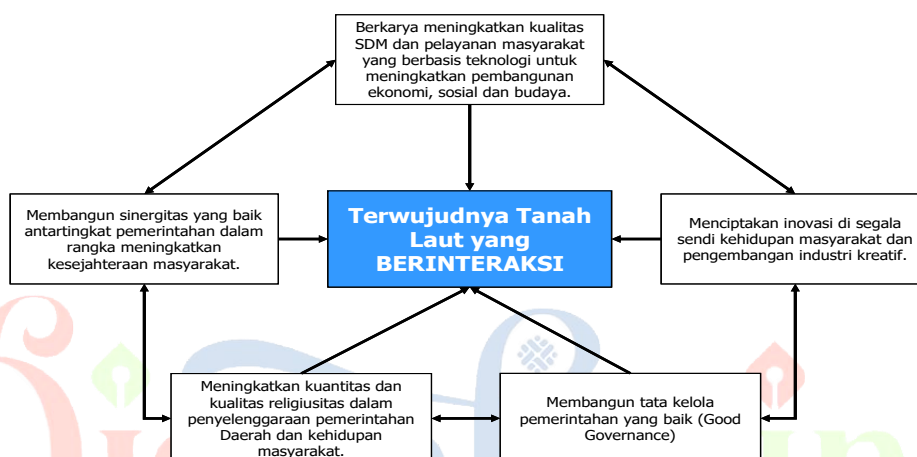
Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut. Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara grafis, hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar dan Tabel di bawah ini.

Gambar Keterkaitan Visi dengan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023



Tabel

Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	
Pokok-Pokok Visi	MISI
BERKARYA	1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
INOVASI	2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
TERTATA	3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).
RELIGIUS	4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
AKTUAL SINERGI	5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Tujuan Sesuai Renstra

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memiliki keunggulan-keunggulan atau kelebihan-kelebihan dan daya saing yang tinggi menuju “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”.

Keunggulan ini dapat diwujudkan mempersyaratkan adanya potensi dan kompetensi untuk bisa lebih produktif, memiliki daya kreatif dan inovatif yang tinggi sesuai tuntutan lingkungan strategi yang senantiasa terus mengalami perubahan dan tumbuh kembang yang semakin dinamis dan kompleks. Lebih produktif berarti menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan, dan memiliki daya kreasi dan inovasi produk secara berkelanjutan yang tinggi, serta memiliki daya saing, baik daya saing komparatif maupun daya saing manfaat (*comparative and advantage competitive*) untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanah Laut menjadi masyarakat yang sejahtera dari segi ekonomi, serta rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dengan meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berkembangnya kehidupan demokrasi dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.

Kompetensi ini merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan, sikap dan perilaku serta etika yang diperlukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan peran yang dimainkannya. Karenanya menuntut adanya “*Sense of responsibility and professionally*” dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan peran masing-masing. *Sense of responsibility*, menghendaki setiap pelaku kepentingan memiliki rasa bertanggung jawab, yakni mau dan mampu bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku, tindakan dalam bingkai melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Sementara *professionally* lebih mengarah pada kompetensi bagi setiap pelaku kepentingan. Kompetensi merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang diserahkan kepada SKPD. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
2. Meningkatkan Pelayanan Penempatan Kerja.
3. Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial.
4. Meningkatkan Kinerja Sektor Industri.

Keterkaitan Tujuan Renstra dengan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023:

- a. Untuk tujuan 1 : Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja selaras dengan **Misi 1** yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Untuk Tujuan 2 dan 3 : Meningkatkan Pelayanan Penempatan Kerja dan Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial selaras dengan **Misi 5** yaitu Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Untuk Tujuan 4 : Meningkatkan Kinerja Sektor Industri selaras dengan **Misi 2** yaitu Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

D. Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dan ditindaklanjuti dengan renstra SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja**” ditetapkan sasaran “Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja”.
2. Untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan Pelayanan Penempatan Kerja**” ditetapkan sasaran “Meningkatnya Pelayanan Penempatan Kerja”.
3. Untuk mencapai tujuan **Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial** ditetapkan sasaran “Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial “
4. Untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan Kinerja Sektor Industri.**” ditetapkan sasaran “Meningkatnya Kinerja Sektor Industri”.

E. Tabel (Tujuan dan Sasaran 5 Tahun)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disnakerind dapat dilihat pada table sebagai berikut :

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN									
KABUPATEN TANAH LAUT									
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69.90%	70.30%	71%	71.12%	71.90%
2	Meningkatkan Pelayanan Penempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	Meningkatnya Pelayanan Penempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	5.20%	5.50%	6%	6.20%	6.50%
3	Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	30%	25%	20%	15%	10%
4	Meningkatkan Kinerja Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	13.50%	14.17%	14.87%	15.57%	16.35%

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators (KPI)* dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan sehingga dalam penyusunan jelas, spesifik dan terukur (measurable) dan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Komitmen dan dukungan pimpinan dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, yaitu :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk 15 >}} \times 100\%$	Bidang PPTK dan UPT. BLK / BPS
2	Meningkatnya Pelayanan Penempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang tercatat}} \times 100\%$	Bidang PPTK
3	Hubungan Industrial harmonis dan kondusif	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan HI tahun } n-1 - (\text{jumlah kasus perselisihan tahun } n)}{\text{Jumlah kasus perselisihan HI tahun } n-1} \times 100\%$	Bidang HIPK
4	Meningkatnya kontribusi sektor industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	$\frac{\text{PDRB tahun } N - \text{PDRB tahun } N-1}{\text{PDRB Tahun } N} \times 100\%$	Bidang Industri/ BPS

G. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mendukung visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dijabarkan dalam sasaran strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah

:

Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - e) Penyediaan alat tulis kantor

- f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - i) Penyediaan makanan dan minuman
 - j) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - k) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
 - l) Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 - 3) Program kerjasama informasi dengan mas media
 - a) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
 - 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a) Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Dan Rencana Kerja (Renja) SKPD
 - 6) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - a) Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah
 - 7) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - a) Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
 - b) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
 - c) Kerjasama pendidikan dan pelatihan
 - d) Penyiapan tenaga kerja siap pakai
 - e) Pengembangan Kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan
 - f) Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
 - 8) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - a) Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
 - b) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
 - c) Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
 - d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

UPT. BLK

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j) Penyediaan makanan dan minuman
 - k) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - l) Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD
- 2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - b) Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja
 - c) Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
 - d) Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK
 - e) Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

Urusan Pilihan Bidang Perindustrian :

1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
 - a) Pengembangan sistem inovasi teknologi
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - a) Pembinaan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - a) Pembinaan kemampuan teknologi industri
4. Program Penataan Struktur Industri
 - a) Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
 - b) Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industry (DAK)
 - c) Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - a) Pengembangan potensi unggulan daerah

H. PERJANJIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2019 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di tandatangani oleh Bupati Tanah Laut, Kepala Dinas dan Para Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,90 %
2	Meningkatnya pelayanan penempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	5.2 %
3	Hubungan industrial harmonis dan kondusif	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	30 %
4	Meningkatnya kontribusi sektor industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	13,65 %
5	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip Dinaskerind	BB

2. Sekretaris

NO	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan dan pelaporan pada LKIP SKPD	BB
		Persentase penyerapan anggaran SKPD	90 %
2	Peningkatan kualitas pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100 %
		Persentase aset yang tercatat	100 %
3	Peningkatan kualitas SDM SKPD	Persentase ASN SKPD yang memiliki sertifikat keahlian	9 %

3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

NO	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, administrasi keuangan dan pelaporan kinerja SKPD	Nilai komponen perencanaan dan pelaporan pada LAKIP SKPD perencanaan	BB
		Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	18

4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NO	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %
		Persentase dokumentasi terkait sarana dan prasarana	100 %
		Persentase asset yang tercatat	100 %
2	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Jumlah Pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	45 orang
3	Meningkatnya kapasitas SDM SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan bersertifikasi	4 orang

5. Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

NO	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial	Cakupan sengketa perusahaan-pekerja yang diselesaikan	22,5%

6. Kasi Persyaratan Kerja

NO	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tercapainya pelaku hubungan industrial yang menaati peraturan ketenagakerjaan	Jumlah orang	60 orang

7. Kasi Hubungan Industrial

NO	Sasaran Strategis kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus	12 kasus
2	Terpetakannya profil perusahaan sebagai bahan kebijakan bidang ketenagakerjaan	Jumlah laporan	1 laporan

8. Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

NO	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya perlindungan hukum dan jamsostek	Jumlah peserta BPJS	15.500 orang

9. Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

NO	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase peserta latih yang berkompeten	50%

2	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat kesempatan kerja	3 %

10. Kasi Pelatihan dan Produktifitas

NO	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya penyusunan database tenaga kerja daerah	Jumlah dokumen	1 Dokumen
3	Terlaksananya pemagangan bagi pencari kerja	Jumlah pencaker	40 Orang
4	Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu kelembagaan dan pelatihan kewirausahaan	Jumlah orang	100 Orang

11. Kasi Penempatan Tenaga Kerja

NO	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya pelayanan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja	Jumlah Paket	9 Paket

2	Tersusunnya informasi bursa tenaga kerja online	Jumlah Dokumen	12 Dokumen
3	Terselenggaranya sosialisasi langkah aman menjadi PMI dan bahaya tindak perdagangan orang	Jumlah Orang	50 Orang

12.Kasi Perluasan Kesempatan Kerja

NO	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya pelatihan berbasis masyarakat bagi wirausaha baru terhadap akses pendanaan	Jumlah orang	120 orang

13.Kabid Perindustrian

NO	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kemampuan teknologi pelaku industri	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	20 IKM
2	Meningkatnya produk IKM unggulan yang terpromosikan	Jumlah IKM unggulan	13 IKM
3	Meningkatnya inovasi teknologi industri	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang	20 IKM
4	Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan IKM	Pertumbuhan jumlah IKM	10 %

5	Menguatnya struktur industri	Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri	30%
---	------------------------------	--	-----

14. Kasi Pembangunan Sumber Daya Industri

NO	Sasaran Strategis kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya pelatihan IKM berbasis teknologi	Jumlah orang	140 Orang
2	Terlaksananya pelatihan IKM berbasis sumber daya alam daerah	Jumlah orang	30 Orang

15.Kasi Sarana dan Prasarana Industri

NO	Sasaran Strategis kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya pembinaan yang berkaitan dengan hilirisasi industri	Jumlah orang	166 Orang
2	Tersedianya sarpras klaster industri	Jumlah klaster industri	2 Klaster Industri
3	Tersedianya sarpras klaster industry (DAK)	Jumlah klaster industri	1 Klaster Industri

16. Kasi Pemberdayaan Industri

NO	Sasaran Strategis kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya pemberian hibah, magang dan fasilitasi GKM	Jumlah orang	205 orang
2	Terikutinya pameran dalam dan luar daerah	Jumlah pameran yang diikuti	9 kali

17. Kepala UPT. BLK

NO	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja	500 orang
2	Tersedianya peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah jenis peralatan	7 jenis
3	Terikutinya pelatihan peningkatan profesionalisme bagi tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Jumlah tenaga kepelatihan dan instruktur	10 orang
4	Terlaksananya rehabilitasi sedang / berat sarana dan prasarana BLK	Jumlah sarana dan prasarana	3 buah gedung dan 1 buah sumur bor

18.Kasubbag Tata Usaha BLK

NO	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Merencanakan dan mengadakan sarana prasarana serta administrasi perkantoran dan keuangan	Persentase pemenuhan pelayanan pelayanan administrasi perkantoran	100 %
		Persentase dokumentasi terkait sarana prasarana	100 %
		Persentase dokumen laporan keuangan secara berkala	100 %

Disnakerind
Tanah Laut

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka memperoleh informasi kinerja yang penting dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dapat dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara membandingkan antara nilai target terhadap realisasi, apabila target terpenuhi maka dikategorikan tercapai, dan begitu juga sebaliknya apabila nilai target tidak tercapai maka dikategorikan tidak terpenuhi.

1. Target dan Capaian IKU

Target dan Capaian IKU dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,90 %	69,68 %
2	Meningkatnya pelayanan penempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	5,2 %	5,13 %
3	Hubungan industrial harmonis dan kondusif	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	30 %	2,28 %
4	Meningkatnya kontribusi sektor industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	13,65 %	12,85 %

2. Uraian dan Analisa Capaian IKU

a. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

Pada Tahun 2019 daya saing tenaga kerja daerah dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,90 %, meningkat dari tahun 2018 sebesar 67,08 %.

b. Meningkatnya pelayanan penempatan kerja

Peningkatan pelayanan penempatan kerja pada tahun 2019 sebesar 5.13 % dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan 89 orang dari 1733 pencari Kerja yang terdaftar, cukup meningkat signifikan dari capaian tahun 2018 yang hanya 0,78 %.

- c. Hubungan Industrial Harmonis dan Kondusif ditandai dengan persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial sebesar 7,6 %, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 21,75 %.
- d. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri ditandai dengan Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 12,85 %, masih sama dengan tahun sebelumnya

B. Capaian Sasaran Strategis

1. Capaian Sasaran Strategis Sesuai Renstra dan Target (Eselon II, III dan IV)

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dan ditindaklanjuti dengan renstra SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja ”** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja”**.
2. Untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan Pelayanan Penempatan Kerja”** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Pelayanan Penempatan Kerja”**.
3. Untuk mencapai tujuan **Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial “**
4. Untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan Kinerja Sektor Industri.”** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Kinerja Sektor Industri”**.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disnakerind dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69.90%	70.30%	71%	71.12%	71.90%
2	Meningkatkan Pelayanan Penempatan Kerja	Meningkatnya Pelayanan Penempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	5.20%	5.50%	6%	6.20%	6.50%
3	Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	30%	25%	20%	15%	10%
4	Meningkatkan Kinerja Sektor Industri	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	13.50%	13.65%	14.17%	14.87%	15.57%

Capaian sasaran strategis dari Eselon II sampai dengan eselon IV dapat dilihat pada tabel berikut :

1. SKPD (Eselon II)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1 Tingkat partisipasi angkatan kerja	67.08%	69.9%	69.68%	99.69%	71.9%	96.91%
2.	Meningkatnya pelayanan penempatan kerja	1 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	0.78%	5.2%	5.13%	98.65%	6.5%	78.92%
3.	Hubungan industrial harmonis dan kondusif	1 Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	21.75%	30%	2.28%	7.600%	10%	0.46%
4.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri	1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	12.85%	13.65%	12.85%	94%	16.35%	78.59%
5.	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	1 Nilai Sakip Disnakerin	B	BB	B	90%	A	A/ 100 %

2. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Meningkatnya kompetensi tenaga	1 Persentase peserta latih yang berkompeten	36%	50%	40.75%	81.50%	75.0%	75.0%
2	Meningkatnya kesempatan kerja	1 Tingkat kesempatan kerja	2.6%	3%	6.52%	217.33%	6.5%	6.5%

a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Terlaksananya penyusunan database tenaga kerja daerah	1 Jumlah dokumen	-	1 dokumen	90%	100%	1 dokumen	100%
2.	Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu kelembagaan dan pelatihan	1 Jumlah orang	-	100 orang	60 orang	60%	100 orang	60%
3.	Terlaksananya pemagangan bagi pencari kerja	1 Jumlah pencaker	-	40 orang	17 Orang	42.5%	40 orang	42.5%

b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Terlaksananya pelayanan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja	1 Jumlah paket	1937 orang	9 paket	3 paket	33.30%	1480 orang	7.5%
2.	Tersusunnya informasi bursa tenaga kerja online	1 Jumlah dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	12 dokumen	100%
3.	Terselenggaranya sosialisasi langkah aman menjadi PMI dan bahaya tindak perdagangan orang	1 Jumlah orang	100 orang	50 orang	50 orang	100.00%	50 orang	100%

c. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Terlaksananya pelatihan berbasis masyarakat bagi Wira Usaha Baru terhadap akses pendanaan	1 Jumlah orang	60 orang	120 orang	120 orang	100.00%	120 orang	100.00%

3. Bidang Hubungan Industrial dan Jamsotek

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial	1 Cakupan sengketa perusahaan-pekerja yang diselesaikan	20%	22.5%	44.0%	195.6%	35%	125.71%

a. Seksi Persyaratan Kerja

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Tercapainya pelaku hubungan industrial yang menaati peraturan ketenagakerjaan	1 Jumlah orang	2093 org pencatatan PKWT, 16 perusahaan yang mengesahkan PP, 2 perusahaan yang mendaftarkan PKB	750 org pencatatan PKWT, 7 perush yang mengesahkan PP, 4 perush yg mendaftarkan PKB	1941 org pencatatan PKWT, 8 perush yg mengesahkan PP, 1 perush yg mendaftarkan PKB	90%	100%	5%

b. Seksi Pengupahan dan Jamsostek

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Terfasilitasinya perlindungan hukum dan jamsostek	1 Laporan (data) perlindungan hukum kepada masyarakat mengenai jamsostek	-	1 laporan	-	100%	1 laporan	20%

c. Seksi Hubungan Industrial

No.	Kinerja Utama	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Terlaksananya fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	1 Jumlah kasus yang terfasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	5 kasus	12 kasus	2,5 kasus	20.8%	36 kasus	6.9%
2.	Terpetakannya profil perusahaan sebagai bahan kebijakan bidang ketenagakerjaan	2 Dokumen laporan profil perusahaan	-	1 laporan	0%	0%	1 laporan	0%

4. Bidang Perindustrian

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Meningkatnya kemampuan teknologi pelaku industri	1. Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	15 IKM	20 IKM	20 IKM	100%	50%	20%
2.	Meningkatnya produk IKM unggulan yang terpromosikan	1. Jumlah IKM unggulan	10 IKM	13 IKM	13 IKM	100%	13 IKM	13 IKM
3.	Meningkatnya inovasi teknologi industri	1. Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang	15 IKM	20 IKM	20 IKM	100%	20 IKM	20 IKM
4.	Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan IKM	1. Pertumbuhan jumlah IKM	58%	10%	15%	50%	10%	10%
5.	Menguatnya struktur industri	1. Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri	20%	30%	2%	7%	30%	6.67%

a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Terlaksananya pelatihan IKM berbasis teknologi	1. Jumlah orang	100 orang	140 orang	140 orang	100%	140 orang	100%
2.	Terlaksananya pelatihan IKM berbasis sumber daya alam daerah	1. Jumlah orang	35 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	100%

b. Seksi Sarana Prasarana Industri

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Terlaksananya pembinaan yang berkaitan dengan hilirisasi industri	1. Jumlah orang	20 orang	166 orang	166 org	100%	166 orang	87%
2.	Tersedianya sarpras klaster industri	1. Jumlah klaster industri	2 KI	3 KI	2 kl	66,67%	17 KI	17%

c. Seksi Pemberdayaan Industri

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Terlaksananya pemberian hibah, magang dan fasilitasi GKM	1 Jumlah orang	100 orang	205 orang	15 orang	7.30%	205 orang	7.30%
2.	Terikutinya pameran dalam dan luar daerah	1 Jumlah pameran yang diikuti dalam dan luar daerah	7 kali	9 kali	13 kali	144%	32 kali	41%

4. Sekretariat

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	1 Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan dan pelaporan pada LKIP SKPD	B	BB	BB	100%	A	90%
		2 Persentase penyerapan anggaran SKPD	89.15%	90%	78.66%	87%	95%	92%
2.	Peningkatan kualitas pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Persentase aset yang tercatat (harus 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Peningkatan kualitas SDM SKPD	1 Persentase ASN SKPD yang memiliki sertifikat keahlian	0%	9%	4 orang	11%	35%	25.70%

d. Subbag Perencanaan dan Keuangan

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, administrasi keuangan dan pelaporan kinerja SKPD	1 Nilai komponen perencanaan dan pelaporan pada LAKIP SKPD	B	BB	BB	100%	A	90%
		2 Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	16 dok	18 dok	18 dok	100%	100%	100%

e. Seksi Umum dan Kepegawaian

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	1 Persentase dokumentasi pelayanan surat menyurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Persentase dokumentasi terkait sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3 Persentase aset yang tercatat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	1 Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaianya dilayani secara tertib	100%	45 Orang	45 Orang	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya kapasitas SDM SKPD	1 Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan bersertifikasi	-	4 Orang	4 Orang	100%	36 orang	11%

5. Kepala UPT. BLK

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja	1 Jumlah pencari kerja	608 orang	1.264 orang	1.248 Orang	98.73%	2.500 orang	49.9%
2.	Tersedianya peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	1 Jumlah jenis peralatan	-	7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	100.0%
3.	Terikutinya pelatihan peningkatan profesionalisme bagi tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	1 Jumlah tenaga kepelatihan dan instruktur	-	10 orang	10 orang	100%	10 orang	100.0%
4.	Terlaksananya rehabilitasi sedang / berat sarana dan prasarana BLK	1 Jumlah sarana dan prasarana	-	3 gedung dan 1 sumur bor	1 gedung dan 1 sumur bor	33%	3 gedung dan 1 sumur bor	33.0%

a. Subbag Tata Usaha BLK

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Merencanakan dan mengadakan sarana prasarana serta administrasi perkantoran dan keuangan	1 Persentase dokumentasi pelayanan surat menyurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Persentase dokumentasi terkait sarana prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3 Persentase dokumen laporan keuangan secara berkala	16 dok/ 100%	16 dok/ 100%	16 dok/ 100%	100%	16 dok/ 100%	100%

2. Uraian dan Analisa Capaian Sasaran Strategis

Capaian Sasaran organisasi diukur berdasarkan capaian SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, adapun capaian sasaran organisasi mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan sehingga dalam penyusunan jelas, spesifik dan terukur (measurable) dan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Komitmen dan dukungan pimpinan dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Berikut uraian dan analisa sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tahun 2019.

i. Sasaran 1 (Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja)

Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Kinerja Utama Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja ditandai dengan Indikator “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2019 ini mencapai 69.68 % atau naik 3.87 % dari tahun sebelumnya sebesar 67,08 %. Dapat juga dilihat pada tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1.	ANGKATAN KERJA (orang)	162.348	171.565
2.	BEKERJA (orang)	156.792	165.710
3.	PENGANGGURAN (orang)	5.556	5.855
4.	TPAK (%)	67,08	69.68
5.	TPT (%)	3,42	3,41

Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja disebabkan faktor demografi, bertambahnya jumlah penduduk, perlambat perekonomian, menurunnya sektor pertambangan, pertanian, perubahan cuaca sehingga mempengaruhi hasil panen, jumlah lulusan sekolah cukup tinggi sehingga pencari Kerja cukup banyak namun lapangan pekerjaan baik dari informal dan formal belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga Kerja.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan mengusung Program Unggulan Bupati Tanah Laut yaitu 500 orang siap kerja per tahun berhasil meningkatkan kompetensi 1756 orang pencari kerja dari 79 paket pelatihan yaitu Juru las SMAW 3G, Pembuatan Pupuk Organik, Service Sepeda Motor Konvensional, Service Sepeda Motor Injeksi, Pemasangan Instalasi Otomasi Listrik Industry, Instalasi Penerangan, Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan, Tukang Pasang Pondasi Batu Alam, Finishing Teknik Semprot, Drafter 2d, Furniture Aluminium, Bangunan Batu dan Beton, Operator Menjahit Pakaian Dasar, Menjahit Pakaian Sesuai Style, Pengolahan Hasil Perikanan, Pengolahan Hasil Pertanian, Perawatan Ac Split, Operator Basic Office, Practical Office Advanced, Desain Grafis, Video Editing, Pembuatan Roti dan Kue, Tata Rias Pengantin, Tata Rias Kecantikan Rambut yang dilaksanakan oleh BLK Kabupaten Tanah Laut, BLK Komunitas Ubudiyah Bati-Bati, BBPLK Bekasi, BBPLK Semarang, BBPLK Bandung, BBPLK Medan dan 13 LPK Swasta.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian juga telah melaksanakan kegiatan Pemagangan (Pelatihan Berbasis Kompetensi/ On The Job Training) bagi 57 pencari kerja melalui Pemagangan Dalam Negeri bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna, pada kegiatan ini peserta yang dimagangkan di perusahaan mendapatkan keterampilan dan dilatih serta mendapatkan bimbingan oleh instruktur

dari perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan jabatannya. Peserta magang nantinya akan direkrut dan ditempatkan di perusahaan yang diikuti.

Untuk mendukung capaian di atas dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan capaian meningkatnya kompetensi tenaga kerja sebesar 40,75 % dari target 50 %, dari jumlah dana Rp. 1.113.526.760,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 502.649.500,- atau 45.14 %. Program ini didukung oleh beberapa kegiatan :

1. Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah dengan hasil capaian berupa Dokumen Database Tenaga Kerja Daerah, dari jumlah dana Rp. 39.954.850,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.154.800,- atau 98 %.
2. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pendamping Dana Dekonsentrasi BLK) dengan capaian meningkatkan kompetensi 1248 pencari kerja, dari jumlah dana Rp. 350.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 224.353.700,- atau 64,10 %.
3. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK dengan capaian meningkatnya kapasitas dan kapabilitas 10 orang Instruktur BLK, dari jumlah dana Rp. 45.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.000.000,- atau 100 %.
4. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja, dengan capaian tersedianya 7 jenis peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja, dari jumlah dana Rp. 30.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.000.000,- atau 88,24 %.
5. Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana dan Prasarana BLK, dengan capaian terlaksananya 2 kegiatan rehabilitasi sarpras BLK, dari jumlah dana Rp. 647.971.910,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 167.141.000,- atau 25,79 %.

ii. Sasaran 2 (Meningkatnya Pelayanan Penempatan Kerja)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada Tahun pada tahun 2019 berhasil meningkatkan pelayanan penempatan kerja sebesar 5.13 % dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan 89 orang dari 1733 pencari Kerja yang terdaftar. Sasaran ini dicapai dengan dukungan Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan capaian program meningkatkan kesemptran kerja sebesar 6.52 % dari target 3 %, dari jumlah dana Rp. 618.303.050,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 357.329.300,- atau 57,79 %. Untuk mendukung capaian program ini dilaksanakan beberapa kegiatan :

1. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja, dengan capaian tersusunnya 12 dokumen informasi bursa tenaga kerja, dari jumlah dana Rp. 8.035.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.090.600,- atau 26,02 %.
2. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, dengan capaian 9 paket pelayanan, diantaranya pelayanan pencatatan pencari kerja sebanyak 1733 orang, Penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada 500 siswa/mahasiswa SMK/PT dan 30 orang pencari kerja dalam rangka memasuki dunia kerja. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui bakat, minat, keahlian, keterampilan, disamping mengetahui tentang dunia Kerja dan karakteristik jabatan yang sesuai bagi dirinya. Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka mempersiapkan diri dalam partisipasinya untuk mengikuti pameran kesempatan kerja/ *job fair*. Dari jumlah dana Rp. 276.480.250,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 124.807.400,- atau 45,14 %.
3. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, dengan keluaran berupa penyuluhan bagi 50 orang masyarakat, aparat kecamatan/ desa dan calon Pekerja Migran Indonesia tentang Regulasi Penempatan Kerja ke Luar Negeri serta pemahaman bahaya tindak pidana penjualan orang, dari jumlah dana Rp. 22.956.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.532.000,- atau 76,37 %.
4. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai, dengan capaian berupa Pamagangan bagi 40 Pencari Kerja, dari jumlah dana Rp. 124.284.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.091.000,- atau 62,83 %.
5. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatuhan Kewirausahaan, dengan capaian Pelatihan Peningkatan Kulaitas Kelembagaan dan Instruktur serta Tenaga Latih Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebanyak 60 orang, dari jumlah dana Rp. 74.578.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.628.900,- atau 46,43 %.
6. Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat, dengan capaian Pelatihan Berbasis Kewirausahaan (Enterpreneur) sebanyak 120 orang, dari jumlah dana Rp. 111.969.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 100.179.400,- atau 89,47 %.

Pada Tahun 2019 juga dilaksanakan beberapa langkah strategis dalam Program Peningkatan Kesempatan Kerja sebagai berikut :

- A. Setiap perusahaan yang membuat izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus mencantumkan informasi lowongan pekerjaan.

- B. Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Penempatan tenaga Kerja bagi perusahaan dengan jumlah peserta sebanyak 30 perusahaan. Sosialisasi ini dalam rangka memberikan informasi tentang kewajiban pelaporan adanya informasi lowongan pekerjaan, proses rekrutmen, proses Penempatan hingga pada pelaporan Penempatan. Kegiatan ini juga dalam rangka mempersiapkan perusahaan dalam partisipasinya mengikuti pelaksanaan pameran kesempatan Kerja/job fair yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020.

iii. Sasaran 3 (Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial)

Upaya peningkatan harmonisasi hubungan industrial menjadi sasaran utama bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan peningkatan penyelesaian jumlah masalah / kasus ketenagakerjaan dari 5 (lima) kasus pada Tahun 2018 menjadi 11 (sebelas) kasus atau meningkat 220%, dan 63,63% diselesaikan dengan Perjanjian Bersama. Sasaran ini disajikan dengan ulasan singkat sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tahun 2019 telah menyelesaikan kegiatan – kegiatan berkenaan dengan kinerja dibidang ketenagakerjaan terutama pada Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan yang kemudian di eksekusi melalui 4 (empat) kegiatan di Seksi Persyaratan Kerja, Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Seksi Hubungan Industrial, yaitu :

1. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial;
2. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan;
3. Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pada masing – masing kegiatan memiliki fokus keluaran dan hasil yang berbeda – beda, dapat tergambar pada tabel di bawah ini :

No.	Nama Kegiatan	Keluaran	Hasil	Jumlah Pagu
1.	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial	Jumlah Laporan Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jamsostek	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Masyarakat dan Pekerja di Perusahaan	Rp. 27.520.000
2.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Terlaksananya Sosialisasi Tentang Norma Ketenagakerjaan	Terciptanya Pemahaman Norma Ketenagakerjaan	Rp. 58.529.000
3.	Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terfasilitasinya Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis	Rp. 64.775.000
4.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terpetakannya Profil Perusahaan di Kabupaten Tanah Laut Sebagai Bahan Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan	Rp. 15.470.500
Total				Rp. 166.294.500

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja merealisasikan anggaran sebesar Rp. **119,004,500,-** atau 71,56 % yang mana pada kegiatan fisiknya telah dilaksanakan secara maksimal atau 97,92%. Sebagaimana yang dapat disimak pada tabel dibawah ini :

NO	UNIT KERJA	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI			
					FISIK	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terfasilitasinya prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	12 kasus	64.775.000	11 kasus	91,66	30.290.000	46,76
2	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial	Jumlah Laporan Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jamsostek	1 Laporan	27.520.000	1 Laporan	100	19.530.000	70,97
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Laporan	15.470.500	1 Laporan	100	11.675.500	75,47
4	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Tertatanya Peraturan di Bidang Ketenagakerjaan	4 PKWT, PP, PKB	58.529.000	4 PKWT, PP, PKB	100	57.509.000	98,26

C. Analisis Kendala

Tentu pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala sehingga pada akhirnya apa yang telah ditargetkan pada awal tahun tidak sesuai dengan realisasinya. Untuk capaian Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja secara fisik sebesar 97,92% pada indikator persentase peningkatan harmonisasi hubungan industrial yaitu perusahaan yang mendapatkan pemahaman hubungan industrial dan perusahaan yang menerapkan norma syarat kerja. Hal ini dipengaruhi oleh capaian pada masing – masing Seksi di bawah ini :

1. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Perubahan nomenklatur pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2019 memunculkan seksi baru pada Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja yang kemudian berganti nama menjadi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kinerja utama Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja membantu meningkatkan jumlah kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta kepatuhan perusahaan pada sistem pengupahan nasional. Pada pelaksanaannya secara fisik telah terlaksana 100% atau 1 (satu) laporan.

2. Seksi Hubungan Industrial

Pada kinerja utama seksi Hubungan Industrial, meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial memiliki 3 (tiga) indikator yaitu tingkat pertumbuhan perusahaan yang membentuk LKS Bipartit, persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama dan persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui anjuran mediasi yang masing – masing capaiannya sebesar 100%, 63,63%, dan 36,36%.

Terlihat bahwa terdapat kendala pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama yang disebabkan beberapa faktor antara lain perubahan regulasi, tidak adanya pejabat fungsional mediator di Kabupaten Tanah Laut, serta minimnya pengawasan ketenagakerjaan.

Sebagai upaya untuk mendukung hal di atas, Seksi Hubungan Industrial melaksanakan kegiatan tambahan berupa monitoring, evaluasi dan pendataan tentang profile perusahaan di Kabupaten Tanah Laut. Dana sebesar Rp. 15.470.500,- (lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dianggarkan untuk mendukung kegiatan tersebut, dengan hasil berupa 1 (satu) laporan yang 100% secara fisik telah dilaksanakan.

3. Seksi Persyaratan Kerja

Kinerja utama seksi Persyaratan Kerja adalah kepatuhan terhadap penerapan norma syarat – syarat kerja yang memiliki indikator jumlah perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan (PP) , perusahaan yang membentuk perjanjian kerja bersama (PKB), serta pencatatan PKWT. Pada tahun 2019, dari masing – masing indikator tersebut terdapat 11 Perusahaan yang mengesahkan PP, 1 perusahaan yang mendaftarkan PKB dan 2039 (dua ribu tiga puluh sembilan) tenaga kerja yang kontrak kerjanya tercatat.

Hal-hal yang berpengaruh dari tingkat kepatuhan terhadap pemenuhan norma syaker ini diantaranya karena inisiator dari pembuat PP dan PKB adalah menjadi kewajiban dari perusahaan dengan mempertimbangkan aspek – aspeknya, maka tinggi rendahnya capaian pembuatan terhadap kedua dokumen tersebut terkendala pada keinginan para pelaku usaha itu sendiri untuk membuat PP dan meneruskannya menjadi PKB. Selain daripada itu terdapat juga faktor lain yaitu berupa implikasi atau dampak terhadap tinggi rendahnya pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi terhadap para pelaku usaha di Kabupaten. Semakin tinggi ketidakpatuhan yang ditemukan oleh pengawas berbanding lurus dengan semakin tingginya permohonan pengesahan PP dan pembuatan PKB dilaksanakan.

Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut berkurang sehubungan dengan terbitnya surat nomor : 566/204/Disnakertrans tanggal 1 Februari 2017 tentang penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan, sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga hal – hal yang berkaitan dengan penegakan hukum yang salah satunya misalnya adalah pengecekan terhadap masa waktu pengesahan PP dan pendaftaran PKB menjadi tidak maksimal.

D. Saran dan Solusi

Berdasarkan kendala yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal sebagai solusi agar capaian terhadap kinerja utama yang telah ditargetkan sesuai indikator yang ditetapkan ditahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut :

1. Harus membuka informasi kepada para pihak terkait akan pentingnya pembuatan PP dan diteruskan ke PKB apabila terdapat serikat pekerja dalam perusahaannya;
2. Harus memiliki alat yang berfungsi sebagai rekam jejak digital yang dikemas dalam bentuk register. Selain itu software ini juga berfungsi sebagai pengingat terhadap perusahaan ketika masa PP dan PKB nya akan berakhir;

3. Terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial perlu diadakan pejabat fungsional mediator yang khusus menangani kegiatan mediasi, yang selama ini sudah lama tidak dimiliki oleh Kabupaten Tanah Laut.
4. Memaksimalkan fungsi aplikasi wajib lapor online yang saat ini belum semua perusahaan di Kabupaten Tanah Laut mendaftarkan perusahaannya di aplikasi ini.

E. Rencana Aksi Tahun 2020

Bahwa sesuai dengan saran dan solusi yang kami ajukan maka harapan kami kedepan pada tahun 2020 akan melaksanakan sebagai berikut :

1. Meminta kepada Badan Kepegawaian terkait untuk segera mengisi jabatan fungsional mediator, semisal dengan membuka lowongan CPNS ataupun P3K;
2. Memanfaatkan dan mengolah data wajib lapor perusahaan di Kabupaten Tanah Laut;
3. Membuat sosialisasi ketenagakerjaan dengan nomenklatur terkait urgensi pembuatan PP, PKB, dan pencatatan PKWT yang dilaksanakan dan didanai penganggarnya melalui APBD tahun berjalan;
4. Membuat software system informasi ketenagakerjaan untuk mempermudah kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

iv. Sasaran 4 (Meningkatnya Kinerja Sektor Industri)

Peningkatan kinerja sektor industri ditandai dengan kenaikan Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB sebesar 12, 85 % yaitu Rp. 1.588.719.390.000,- dari PDRB Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.362.241.470.000,-. Untuk PDRB Sektor Industri masih memakai data Capaian Tahun 2018 karena Badan Pusat Statistik sebagai penanggung jawab data makro tersebut belum merilis data capaian Tahun 2019.

Sebagai gambaran peningkatan Kinerja Sektor Industri dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Pertumbuhan Peningkatan Jumlah Industri

	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah Industri Besar	50	51
Jumlah Industri Menengah	64	65
Jumlah Industri Kecil	3128	3128

Tabel Pertumbuhan Peningkatan Industri Formal

	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah Industri Formal	114	19

Untuk mendukung capaian di atas dilaksanakan beberapa program dengan realisasi pendanaan :

1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri dengan hasil capaian meningkatnya kualitas SDM 205 orang pelaku industri dari jumlah dana Rp. 854.046.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 484.407.800,- atau 56,72 %.
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Kegiatan Fasilitasi Bagi Industri Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumberdaya dengan hasil capaian meningkatnya pemahaman 30 orang pelaku IKM dalam teknik industri dari jumlah dana Rp. 27.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.233.600,- atau 78,64 %.
3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dengan hasil capaian meningkatnya kemampuan teknologi 140 orang pelaku industri dari jumlah dana Rp. 202.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 178.105.738,- atau 87,95 %.
4. Program Penataan Struktur Industri, Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri, Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri (DAK), dan Kegiatan Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga Ke Hilir dengan hasil capaian terbangunnya Sentra IKM dan peningkatan keterampilan masyarakat dari jumlah dana Rp. 2.826.365.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.198.948.878,- atau 77,80 %.
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Kegiatan Pengembangan potensi unggulan daerah dengan capaian meningkatnya promosi dan kerjasama investasi bagi IKM unggulan dengan mengikuti 6 kali pameran baik di dalam maupun di luar daerah dari jumlah dana Rp. 505.893.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 491.008.308,- atau 97,06 %.

v. Sasaran 5 Pada Perjanjian Kerja (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD)

Sasaran ini dicapai dengan melihat nilai daripada Sakip Disnakerind, untuk nilai Sakip tahun 2018 memperoleh nilai 69,14 dengan kategori Baik, akuntabilitas

kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Pencapaian ini didukung dengan kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi tata kelola kesekretariatan, perkantoran, perencanaan kebutuhan, pencatatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pelayanan tamu, rapat-rapat dan lain-lain terkait dengan tugas dan fungsi. Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, terkait tugas dan fungsi.

Pada sektor perencanaan dan keuangan juga dilaksanakan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pembuatan laporan baik keuangan dan laporan kinerja yang telah diterbitkan yaitu : Penyusunan Renstra 2018-2023, Renja Perubahan 2019, Renja 2020, Pencapaian kinerja selama 12 bulan, laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan, Laporan AKIP, dan LKPJ serta LPPD tahun 2018.

Untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis diperlukan terobosan dan inovasi oleh unit kerja SKPD. Pada Tahun 2019 melalui Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat meluncurkan sebuah Inovasi Baru, yaitu **SI Kijang**.

SI KIJANG adalah sebuah inovasi Sistem Informasi Kinerja dan Keuangan melalui kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi. SI Kijang dibangun oleh Subbag Perencanaan dan Keuangan pada unit kerja Sekretariat, Hal ini diambil sebagai langkah dalam meningkatkan sistem pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja, yang layanannya terdiri atas :

- a. Verifikasi dan pengendalian
- b. Pencetakan kwitansi
- c. Pencetakan laporan kinerja program dan Kegiatan
- d. Evaluasi

Inovasi SI KIJANG ini juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 sebagaimana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut yaitu **“BERINTERAKSI”**, tepatnya pada poin : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) (poin 3 dari 5).

Inovasi SI KIJANG ini juga selaras dengan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yaitu Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD.

SI Kijang memiliki banyak manfaat bagi SKPD Disnakerind, antara lain:

1. Mempercepat dan mempermudah pengendalian dan verifikasi keuangan;
2. Mengurangi kesalahan dalam pencetakan kwitansi;
3. Meningkatkan kualitas pelaporan capaian program dan kegiatan;
4. Meminimalisir adanya temuan pada pertanggungjawaban keuangan
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaporan kinerja dan keuangan SKPD;
6. Memudahkan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD;
7. Meningkatkan kualitas pengendalian internal SKPD;
8. Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD

Bagi daerah Kabupaten Tanah Laut SI Kijang berperan sebagai :

1. Daya ungkit peningkatan akuntabilitas kinerja daerah (menaikkan nilai sapip kabupaten)
2. Daya ungkit peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan (good governance)

Untuk realisasi keuangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan hasil capaian tercapainya administrasi perkantoran yang baik dari jumlah dana Rp. 1.140.522.911,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.065.343.050,- atau 93,41 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan hasil capaian terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dari jumlah dana Rp. 362.976.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 347.627.500,- atau 95,77 %.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan hasil capaian meningkatnya kapasitas ASN Dinas dari jumlah dana Rp. 18.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.000.000,- atau 61,11 %.
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan dengan hasil capaian terpenuhinya pelaporan kinerja dan keuangan dinas dari jumlah dana Rp. 6.299.950,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.293.900,- atau 99,90 %.
5. Program kerjasama informasi dengan mas media dengan hasil capaian tersampainya informasi pembangunan kepada masyarakat dari jumlah dana

Rp. 15.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100 %

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2018 terhadap 2019

- BELANJA TIDAK LANGSUNG

Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2018 :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Gaji dan tunjangan	2.727.323.400	2.483.045.594	91,04
2.	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1.033.221.000	885.880.984	85,73

Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2019 :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Gaji dan tunjangan	3.635.823.118	2.699.749.243	74,25
2.	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	2.927.439.809	2.797.802.220	95,57

- BELANJA LANGSUNG

Jumlah belanja langsung untuk tahun anggaran 2019 setelah perubahan ditetapkan sebesar **Rp. 8.228.505.295,-** jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan, yang terdiri atas 16 (enam belas) program yang

terdiri atas 53 (lima puluh tiga) kegiatan dengan realisasi sebesar **Rp. 6.075.871.689,-** atau tercapai 73,83 %.

Perbandingan Realisasi Belanja Langsung

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kabupaten Tanah Laut

Tahun Anggaran 2019 dan 2018

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	% Peningkatan/Penu- runan
	BELANJA LANGSUNG	4.673.258.769	6.075.871.689	30,01
	Belanja Pegawai	32.810.000	207.014.000	530,09
	Belanja Barang/ Jasa	2.684.008.769	3.450.448.743	28,55
	Belanja Modal	1.956.440.000	2.418.408.946	23,61

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2019 berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada sebagai berikut :

A. DINAS

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,140,522,911	1,065,343,050	93.41
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150,888,437	132,604,381	87.88

2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	27,952,900	24,574,900	87.92
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6,297,500	5,534,200	87.88
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15,750,000	15,000,000	95.24
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13,673,700	13,657,400	99.88
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,099,950	8,099,800	100.00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,802,000	5,268,200	90.80
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,683,000	6,426,000	96.15
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	18,954,000	18,646,000	98.38
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	488,790,000	488,790,000	100.00
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	39,000,000	37,305,000	95.65
12	Penyediaan jasa penunjang Kinerja SKPD	358,631,424	309,437,169	86.28
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	362,976,008	347,627,500	95.77
13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0	0	-
14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	59,200,000	55,934,300	94.48
15	Pengadaan peralatan gedung kantor	290,550,808	279,542,200	96.21
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor	13,225,200	12,151,000	91.88
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18,000,000	11,000,000	61.11
17	Pendidikan dan pelatihan formal	18,000,000	11,000,000	61.11
4	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	6,299,950	6,293,900	99.90

18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,299,950	6,293,900	99.90
5	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	39,954,850	39,154,800	98.00
19	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	39,954,850	39,154,800	98.00
6	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	618,303,050	357,329,300	57.79
20	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	8,035,000	2,090,600	26.02
21	Penyebarluasan informasi bursa tenaga Kerja	276,480,250	124,807,400	45.14
22	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	22,956,100	17,532,000	76.37
23	Penyiapan Tenaga kerja siap pakai	124,284,000	78,091,000	62.83
24	Pengembangan Kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan	74,578,300	34,628,900	46.43
25	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	111,969,400	100,179,400	89.47
7	Program Perlindungan dan pengembangan lembaga Ketenagakerjaan	166,294,500	119,004,500	71.56
26	Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industri	64,775,000	30,290,000	46.76
27	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	27,520,000	19,530,000	70.97
28	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	58,529,000	57,509,000	98.26
29	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15,470,500	11,675,500	75.47
8	Program Kerjasama Informasi dengan mas Media	15,000,000	15,000,000	100.00

30	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	15,000,000	15,000,000	100.00
9	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	505,893,000	491,008,308	97.06
31	Pengembangan potensi unggulan daerah	505,893,000	491,008,308	97.06
10	Program Peningkatan IPTEK sistem produksi	854,046,000	484,407,800	56.72
32	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	854,046,000	484,407,800	56.72
11	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah	27,000,000	21,233,600	78.64
33	Pembinaan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	27,000,000	21,233,600	78.64
12	Program Peningkatan kemampuan teknologi industri	202,500,000	178,105,738	87.95
34	Pembinaan kemampuan teknologi industri	202,500,000	178,105,738	87.95
13	Program Penataan struktur industri	2,826,365,500	2,198,948,878	77.80
35	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	639,453,200	162,968,500	25.49
36	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	187,136,300	140,612,700	75.14
37	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri (DAK)	1,999,776,000	1,895,367,678	94.78
14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	6,299,900	6,208,400	98.55
38	Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Dan Rencana Kerja (Renja) SKPD	6,299,900	6,208,400	98.55

	JUMLAH	6,789,455,669	5,340,665,774	78.66
--	---------------	----------------------	----------------------	--------------

B. UPT. BLK

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	REALISASI	
			Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	365,477,716	271,711,215	74.34%
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	129,549,732	54,956,076	42.42%
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	11,175,300	7,967,050	71.29%
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3,600,000	130,000	3.61%
4	Penyediaan alat tulis kantor	8,983,600	6,629,000	73.79%
5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	1,349,700	1,175,100	87.06%
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,696,600	2,241,000	83.10%
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2,250,000	2,250,000	100.00 %
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,800,000	1,680,000	93.33%
9	Penyediaan makanan dan minuman	2,250,000	270,000	12.00%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70,000,000	65,534,850	93.62%
11	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	131,822,784	128,878,139	97.77%
2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerjaan	1,073,571,910	463,494,700	43.17%

1	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	30,600,000	27,000,000	88.24%
2	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	45,000,000	45,000,000	100.00 %
3	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK	647,971,910	167,141,000	25.79%
4	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	350,000,000	224,353,700	64.10%
JUMLAH		1,439,049,626	735,205,915	51.09%



BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2019. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LAPKIN ini.

Secara umum rata-rata pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sesuai Rencana Strategik Tahun 2018-2023 yang terdiri atas 5 (lima) sasaran dalam tahun 2019 telah mencapai target yang telah ditentukan walaupun tidak tercapai 100 %.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Tahun 2019, semoga memberikan informasi yang berarti bagi yang memerlukan serta menjadi tolok ukur terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

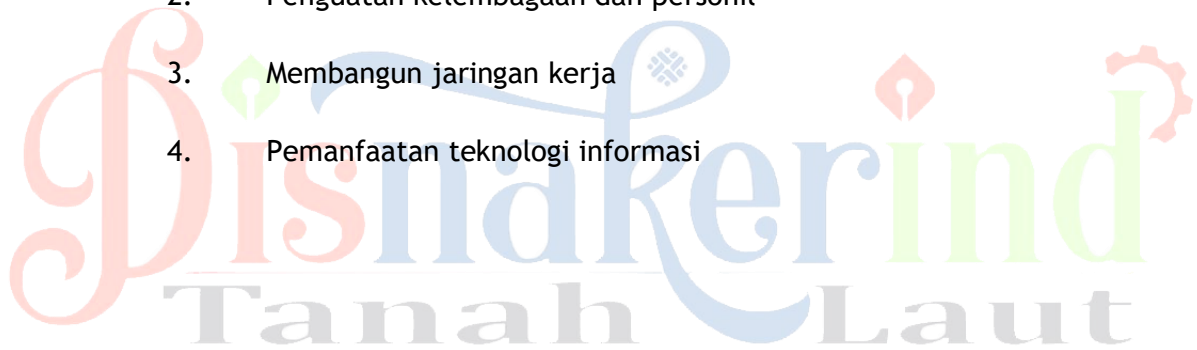
1. Bidang Ketenaga kerjaan sebagai urusan wajib tentunya akan memperoleh perhatian dalam peningkatan kualitas SDM, anggaran, dan peralatan dalam rangka meminimalisasi peta kerawanan ketenaga kerjaan dan membekali calon tenaga kerja yang terampil dalam mempersiapkan memasuki dunia kerja di Kabupaten Tanah Laut.

2. Bidang Perindustrian


- a. Sebagai urusan pilihan namun memiliki peran yang cukup strategis sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku industri kecil menengah dengan pembangunan sentra IKM.
- b. Sebagai daerah yang termasuk dalam pembangunan proyek strategi nasional, pembangunan kawasan industri jorong terus didorong percepatan pembangunan dan pengelolaan nya.

3. Dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian, dilakukan melalui strategi :

1. Penguatan regulasi di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian
2. Penguatan kelembagaan dan personil
3. Membangun jaringan kerja
4. Pemanfaatan teknologi informasi



Pelaihari, 30 Januari 2020


Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kabupaten Tanah Laut,



Disnakerind Tanah Laut

LAMPIRAN

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2019**



**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT**